

# PIRANTI LUNAK

## DAFTAR :

1. UNDANG - UNDANG
2. JUKLAK
3. JUKNIS
4. SKEP
5. JUKLAP

S  
A  
T  
-  
Z  
-  
M  
A  
K  
M  
A  
M

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
 RESOR DOMPU

DAFTAR : PIRANTI LUNAK PADA SAT  
 INTELKAM POLRES DOMPU

NO.	JENIS BUKU	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Juklap / 081 / II / 1995	Pengawasan terhadap kewajiban penanggung jawab penginapan untuk menyelenggarakan Buku Tamu orang Asing dan Daftar isian Orang Asing	1 Buah	
2	Petunjuk Lapangan No. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995	Perizinan dan Pemberitahuan kegiatan masyarakat	1 Buah	
3	Juklak / 03 / VII / 1997	Kewajiban membuat Laporan Informasi sebagai tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas	1 Buah	
4	Petunjuk Lapangan No. Pol : Juklap / 01 / I / 1997 tanggal 31 Januari 1997	Pemberitahuan Surat Keterangan Kampanye Pemilihan Umum tahun 1997	1 Buah	
5	Petunjuk Lapangan No. Pol : Juklap / 12 / III / 1997 tanggal 20 Maret 1997	Pengamanan Kampanye	1 Buah	
6	Skep / 1599 / X / 1998	Naskah Sementara Buku petunjuk Lapangan Pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum	1 Buah	
7	Instruksi Kapolri No. Pol : Ins / 01 / I / 1997 / tanggal 11 Januari 1997	Kewajiban setiap anggota Polri untuk membuat Laporan Informasi	1 Buah	
8	Skep Kapolri / 1198 / IX / 2000	Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / Polri	1 Buah	
9	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1599 / X / 1998	Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penyampaian pendapat di muka umum	1 Buah	

1	2	3	4	5
10	Undang – undang Nomor 9 tahun 1998	Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.	1 Buah	
11	UU No. 42 tahun 1999 Tanggal 30 September 1999	Jaminan Fidusia	1 Buah	
12	Surat Keputusan Kapolri : No. Pol : Skep / 767 / VI / 1999 tanggal 19 Juli 1999	Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tata tulisan dinas di Lingkungan Polri.	1 Buah	
13	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 tahun 2001	Retribusi Izin mendirikan bangunan	1 Buah	
14	Undang – undang Nomor 32 tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi	1 Buah	
15	Undang – undang Nomor 2 tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Buah	
16	Skep Kapolri No. Pol : Skep / 816 / IX / 2003 tanggal 12 Sep 2003	Naskah Sementara Buku petunjuk lapangan penerbitan SKCK	1 Buah	
17	Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2003	Ketenagakerjaan	1 Buah	
18	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 816 / IX / 2003	Naskah sementara Petunjuk Lapangan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	1 Buah	
19	Himpunan Peraturan Pemerintah PP Nomor 1, 2 dan 3 tahun 2003	Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan umum bagi Anggota Polri.	1 Buah	

1	2	3	4	5
20	Undang – undang RI nomor 12 Tahun 2004	Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Buah	
21	Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004	Pemerintah Daerah.	1 Buah	
22	Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan No. Pol. : Skep / 20 / IX / 2004 tanggal 15 September 2004	Pedoman pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen dibawah permukaan.	1 Buah	
23	Undang – undang RI Nomor 39 tahun 2004	Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.	1 Buah	
24	Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 12 / II 2004 tanggal 19 Pebruari 2004	Pedoman penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri	1 Buah	
25	Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 7 / I / 2005	Organisasi dan tata kerja satuan – satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Neara Republik Indonesia Daerah (Polda) Lampiran “A” Polda Umum, “B” Polda Metro Jaya dan “C” Polres.	1 Buah	
26	Panduan Teknis Atas Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 37 / I / 2005	Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Buah	
27	Surat Keputusan Kabaintelkam No. Pol : Skep / 01 / I / 2005 tanggal 1 Januari 2005	Rencana Kerja Badan Intelijen Keamanan (Renja BIK) tahun 2005	1 Buah	
28	Skep Kapolri No. Pol : Skep / 411 / VI / 2005 tanggal 23 Juni 2005	Pedoman Administrasi Produk intelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Buah	

1	2	3	4	5
29	Skep Kapolri No. Pol : Skep / 412 / VI / 2005 tanggal 23 Juni 2005	Pedoman pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan	1 Buah	
30	Skep Kapolri No. Pol : Skep / 993 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005	Pedoman pelaksanaan Penggalangan Intelijen Keamanan	1 Buah	
31	Skep Kapolri No. Pol : Skep / 990 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005	Pedoman pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keamanan	1 Buah	
32	Kep Kapolri No. Pol : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005, Lampiran "C" Polres	Perubahan Atas Kep Kapolri No. Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata kerja satuan – satuan Organisasi pada tingkat Polda Lampiran "A" Polda Umu, "B" Polda Metro Jaya dan "C" Polres	1 Buah	
33	Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 20 / IX / 2005, tanggal 7 September 2005	Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 (Renstra Polri)	1 Buah	
34	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 989 / XII / 2005	Pedoman Polsek sebagai Basis Deteksi	1 Buah	
35	Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 737 / X / 2005	Kebijakan dan Strategi Penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.	1 Buah	
36	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005	Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1 Buah	
37	Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 tahun 2008 Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005	Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1 Buah	

1	2	3	4	5
38	Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005	Tentang Desa	1 Buah	
39	Peraturan Pemeintah RI Nomor 48 tahun 2005	Pengangkatan tenaga Honore menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.	1 Buah	
30	Peraturan Kapolri No.Pol : 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006	Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Buah	
31	Himpunan Peraturan Perundang - undangan	Undian dalam rangka Pengumpulan Sumbangan untuk usaha Kesejahteraan Sosial	1 Buah	
32	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 483 / VIII / 2006 tanggal 3 Agustus 2006	Pedoman kesiapan Antisipasi Bencana Alam (Gempa – Tsunami )	1 Buah	
33	Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006	Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.	1 Buah	
34	Surat Karo Renbang Polda NTB No. Pol : B / 3064 / IX / 2007 / Ro Renbang tanggal 11 September 2007	Pedoman penggunaan APBN Satker Wilayah T.A 2007	1 Buah	
35	Undang – undang RI nomor 22 tahun 2007	Penyelenggaraan Pemilihan umum	1 Buah	
36	Surat Keputusan Kabaintelkam Polri No. Pol : Skep / 74 / 2007 / Baintelkam	Pedoman pelaksanaan Pejejukan Teknik ( Tecnical Surveillance)	1 Buah	
37	Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 1 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008	Pedoman penyusunan Rencana kerja di lingkungan Polri	1 Buah	

1	2	3	4	5
38	Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2008	Tata cara pemberitahuan dan penerbitan Surat tanda terima pemberitahuan Kampanye Pemilu.	1 Buah	
39	Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008	Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.	1 Buah	
40	Undang – undang No. 2 Tahun 2008	Partai Politik	1 Buah	
41	Undang – undang No. 10 tahun 2008	Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD (Pemilu Legislatif)	1 Buah	
42	Undang – undang No. 42 Tahun 2008	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Buah	
43	Peraturan Kapolri No. 06 tahun 2008	Tata cara pemberitahuan dan penerbitan STTP Kampanye Pemilu	1 Buah	
44	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 81 / XII / 2008 tanggal 10 Desember 2008	Panduan Teknis Sistem Anggaran intelijen berbasis kinerja	1 Buah	
45	Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008	Pedoman pelaksanaan Kampanye pemilihan umum anggota DPRD, DPD dan DPRD	1 Buah	
46	Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008	Pedoman dasar strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri	1 Buah	
47	Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan No. Pol. : SKEP / 62 / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008	Pedoman penyelenggaraan Operasi Intelijen di lingkungan Intelijen Keamanan Polri	1 Buah	
48	Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2008	Tata cara penyisihan pelanggaran Pidana Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Buah	

1	2	3	4	5
49	Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2008	Tata cara pemberitahuan dan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum	1 Buah	
50	Undang – undang RI Nomor 44 tahun 2008	Pornografi.	1 Buah	
51	Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009	Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian	1 Buah	
52	Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009	Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas POLRI	1 Buah	
53	Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2009	Pedoman teknis Kampanye pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	1 Buah	
54	Peraturan KPU Nomor : 45 tahun 2009	Perubahan terhadap peraturan Nomor 10 tahun 2009 tentang tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Perturan komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2009	1 Buah	
55	Peraturak Kapolri Nomor 8 tahun 2009	Implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri.	1 Buah	
56	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2009	Perubahan kedua atas peraturan Badan pengawas pemilu Nomor 11 tahun 2008 tentang tatacara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, pemilihan dan penetapan serta pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas Pmilu Luar Negeri.	1 Buah	



1	2	3	4	5
57	Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009	Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Buah	
58	Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009	Narkotika	1 Buah	
59	Peraturan KPU Kab. Dompu nomor 12 tahun 2010	Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2010	1 Buah	
60	Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 366 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010	Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres)	1 Buah	
61	Keputusan Kapolres Dompu Nomor : Kep / 686 / VII / 2010 tanggal 20 Juli 2010	Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Dompu TA. 2010-2014	1 Buah	
62	Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 4 / IV / 2010	Pedoman perencanaan Kapolri tahun 2011	1 Buah	
63	Undang – undang RI Nomor 12 tahun 2008	Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.	1 Buah	
64	Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 17 Agustus 2007	Tata Kearsipan di Lingkungan Polri	1 Buah	
65	Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 313 / V / 2010	Kode Klasifikasi Arsip Polri	1 Buah	
66	Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 314 / V / 2010	Jadwal Retensi Arsip Non Kepegawaian dan Non Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Buah	
67	Peraturan Kaba Intelkam Polri nomor 2 tahun 2012	Penyelenggaraan Produk Intelijen di lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia		

1	2	3	4	5
68	Peraturan Kaba Intelkam Polri Nomor 1,2,3,4 dan 5 Tahun 2013	Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, Penyelenggaraan produk Intel serta Pembinaan dan Pembentukan Jaringan.		

Dompu, 01 Juli 2017  
KASAT INTELKAM



ABDUL HARIS  
IPTU NRP 77090380